

BAB III

Trans-Pasific Partnership (TPP)

Trans-pasific partnership adalah perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara dan mungkin masih banyak negara lain yang ingin bergabung. Dua belas anggota *Trans-pasific Partnership* saat ini ialah Amerika Serikat, Kanada, Chili, Malaysia, Vietnam, Meksiko, Selandia baru, Peru, Singapura, Jepang, Brunei Darusalam, Australia. Dalam proses negosiasi perjanjian ini terdapat lebih dari 20 bab yang akan dibahas, mitra TPP mengharapkan perjanjian ini akan menjadi “comprehensive and high-standard,” karena mereka berusaha untuk menghapus tarif dan hambatan non tariff untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian. Perjanjian Trans-pasific Partnership ini juga dibentuk untuk membangun atau memperluas aturan berbagai masalah termasuk hak kekayaan intelektual (HKI), investasi asing langsung, dan isu-isu terkait perdagangan lainnya. Para mitra TPP juga berusaha untuk menciptakan “kesepakatan abad-21” yang membahas isu-isu baru dan lintas sektoral yang disajikan oleh ekonomi yang semakin mengglobal. Dengan isu-isu yang terdapat dalam *Trans-pasific Partnership* tersebut dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menaikkan posisi kelas Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju

A. Sejarah *Trans-Pacific Partnership* (TPP)

Perjanjian *Trans-Pacific Partnership* atau TPP merupakan kelanjutan dari perjanjian TPSEP, dimana terdapat beberapa negara yang menjadi anggota baru seperti Amerika Serikat, Australia, Peru dan Vietnam. Peralihan TPSEP menjadi TPP terjadi pada tahun 2008 yang merupakan gabungan negara-negara TPSEP dan beberapa negara APEC.³⁸ Perjanjian *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPP) atau kemitraan Trans Pasifik secara garis besar merupakan suatu konsep perdagangan bebas dalam sektor barang, jasa dan investasi dan menjadikan lautan pasifik sebagai perputaran perdagangan.³⁹ Perjanjian ini yang juga dikenal sebagai P4 yaitu merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama yang anggotanya terdiri dari kedua sisi pasifik.⁴⁰

Pasifik-4 (P4) pertama kali dikenalkan pada bulan maret 2006 oleh Brunei Darussalam, Chili, Selandia Baru, dan Singapura. Tahun 2008 Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Peru, dan Vietnam menyatakan niatnya untuk bergabung kedalam perjanjian P4 tersebut. Awalnya perjanjian P4 tidak menarik banyak perhatian karena semua anggota di P4 merupakan negara kecil. Namun, ketika AS menyatakan niatnya untuk bergabung, blok tersebut dianggap memiliki implikasi untuk integrasi ekonomi Asia dan Pasifik. Meskipun skala ekonomi negara-negara P4

³⁸Puput Marta Binati, "*Keuntungan Amerika Serikat dalam Trans-Pacific Partnership (TPP)*", (eJournal Ilmu Hubungan Internasional FISIP-unmul Volume 4, Nomor 2, 2016: 429-440), hlm 430

³⁹Eva Marzrieva "*Kemitraan Trans Pasifik, Fokus Utama Forum APEC di Bali*", (Voice of America 2013), Tersedia di: <<http://www.voaindonesia.com/content/tpp-fokus-utama-forum-apec-di-bali/1748844.html>> [Diakses 24 Maret 2016 pukul 14:30]

⁴⁰Carlos Kuriyama, "*The Mutual Usefulness between APEC and TPP*", APEC Policy Support Unit October 2011

kecil, mereka menyatakan visi mereka untuk mengembangkan perjanjian sebagai dasar untuk masa depan yang lebih besar pan-Pasifik perdagangan blok, dan memutuskan untuk menerapkan liberalisasi perdagangan antara negara-negara anggota.⁴¹

Amerika Serikat menyatakan keterlibatannya dengan perjanjian P4 pasca pergantian presiden Amerika Bush dengan Obama pada 14 Desember 2009.⁴² Pada pemerintahan Obama, Amerika Serikat menampakan niatnya bergabung dalam perjanjian P4 tahun 2008 dan resmi bergabung tahun 2009. Amerika Serikat berkeinginan untuk terlibat dengan negara-negara TPP dengan tujuan membentuk sebuah kesepakatan regional yang akan memiliki keanggotaan berbasis luas dan standar yang tinggi dalam perjanjian perdagangan abad ke-21.

Perundingan pertama perjanjian P4 diadakan pada bulan Maret 2010 di Melbourne, Australia dengan 8 negara kemitraan. Selama tahun 2010, P4 melakukan empat putaran perundingan. Pada putaran perundingan keempat negara mitra P4 bertambah dengan bergabungnya Malaysia pada Oktober 2010. Pada tahun 2010, *Pacific Four* (P4) berganti nama menjadi Trans-pacific Partnership sebagai bentuk perluasan mitra.⁴³ Perundingan pertama TPP yang sebelumnya disebut P4 diikuti 8 negara mitra TPP. Pasca Malaysia bergabung, anggota mitra TPP berjumlah 9

⁴¹Inkyo Cheong, "Negotiations for the Trans-Pacific Partnership Agreement: Evaluation and Implications for East Asian Regionalism", (ADB Working Paper Series, Asian Development Bank Institute), hlm 4.

⁴²Fergusson, I.F., Vaughn B., "The Trans-Pacific Partnership Agreement". (Congressional Research Service) 12 Desember 2011

⁴³Loc.cit.

negara anggota. Kemitraan negara P4 atau *Trans-pacific Partnership* pada tahun 2010 hingga 2011 berjumlah 9 negara mitra TPP dan telah melakukan empat putaran perundingan selama tahun 2010.⁴⁴Saat ini ada 12 negara yang bergabung menjadi anggota *Trans-Pasific Partnership* diantaranya yaitu Selandia Baru, Chili, Brunai Darussalam, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Jepang, Kanada dan Meksiko. (Gambar 3.1)

Mengenai dibentuknya perjanjian perdagangan bebas ini, menurut pasal 1.1 perjanjian TPSEP (2005), perjanjian ini didasari oleh kepentingan bersama untuk memperdalam hubungan diberbagai bidang, diantaranya keuangan, teknologi, pendidikan, ekonomi, dan kerjasama lapangan. Namun didalam perjanjian tersebut tidak hanya terbatas kepada bidang-bidang itu saja karena dapat diperluas ke bidang lainnya. Dengan demikian, seriap negara anggota perjanjian juga berupaya mendukung proses liberalisasi di APEC secara konsisten dengan melakukan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Berikut ialah pasal 1.1 perjanjian TPSEP:

TPSEP didasarkan atas kepentingan bersama dan pendekatan hubungan antar anggota di berbagai bidang. Perjanjian TPSEP mencakup bidang komersial, ekonomi, keuangan, ilmu sains, teknologi dan kerjasama antar negara. Perjanjian dapat diperluas atas persetujuan pihak anggota untuk meningkatkan manfaat dari perjanjian. Para anggota

⁴⁴Ratnawilis & IndraPahlawan, S.IP, M.Si, "*Kepentingan Nasional Indonesia untuk Tidak Bergabung dalam Trans-Pasific Partnership (TPP) di Asia Pasifik than 2011*", (Jom FISIP Volume 2 NO.1, Februari 2015)

perjanjian berupaya untuk mendukung proses liberalisasi di APEC secara konsisten dengan tujuan untuk perdagangan bebas dan investasi.

Secara spesifik pasal 1.1 menjelaskan bahwa TPSEP ini bertujuan untuk:

1. Mendorong ekspansi dan penganekaragaman perdagangan di antara negara anggota
2. Menghilangkan hambatan perdagangan barang dan jasa antara negara anggota dan memfasilitasi dagang lintas batas negara;
3. Mendorong persaingan yang sehat di area perdagangan bebas
4. Meningkatkan peluang investasi antar negara;
5. Memberikan perlindungan yang memadai dan efektif dalam penegakan hak
6. Menciptakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa perdagangan.

TPSEP adalah perjanjian perdagangan bebas pertama yang menghubungkan Asia, Pasifik, dan Amerika Latin, mengingat negara pendiri berada di berbagai belahan dunia, Brunei Darussalam dan Singapura yang berada di Asia, Selandia Baru yang berada di Pasifik, dan Chili yang berada di Amerika Latin . Selain keragaman geografis, perjanjian ini menarik karena mencakup berbagai bidang. Tidak seperti

kebanyakan perdagangan bebas lainnya, TPSEP mencakup semua sektor, termasuk sektor pertanian.⁴⁵

TPSEP merupakan perjanjian perdagangan bebas dalam berbagai bidang, serta beberapa regulasi sebagai instrumennya. Selain itu, penandatanganan TPSEP ini juga dibarengi dengan ratifikasi dua nota kesepahaman terkait kerjasama lingkungan dan tenaga kerja. Walaupun TPSEP ini terkesan fleksibel namun perjanjian ini mempunyai badan dan komite yang memastikan implementasi perjanjian yaitu Komisi Utama. Komisi tersebut bertanggung jawab atas aturan perjanjian. Komisi ini berhak untuk membuat pertemuan tingkat Menteri atau pejabat senior yang ditentukan oleh anggota. Menurut Pasal 17.2 TPSEP, Komisi tersebut bertugas untuk mengawasi kerja dari komite lain dan kelompok kerja yang dibentuk oleh TPSEP. Pada saat penandatanganan perjanjian TPSEP, para anggota membentuk beberapa cabang komite TPSEP, diantaranya komite perdagangan barang, tindakan sanitary dan phytosanitary serta badan yang mengurus hambatan perdagangan.⁴⁶

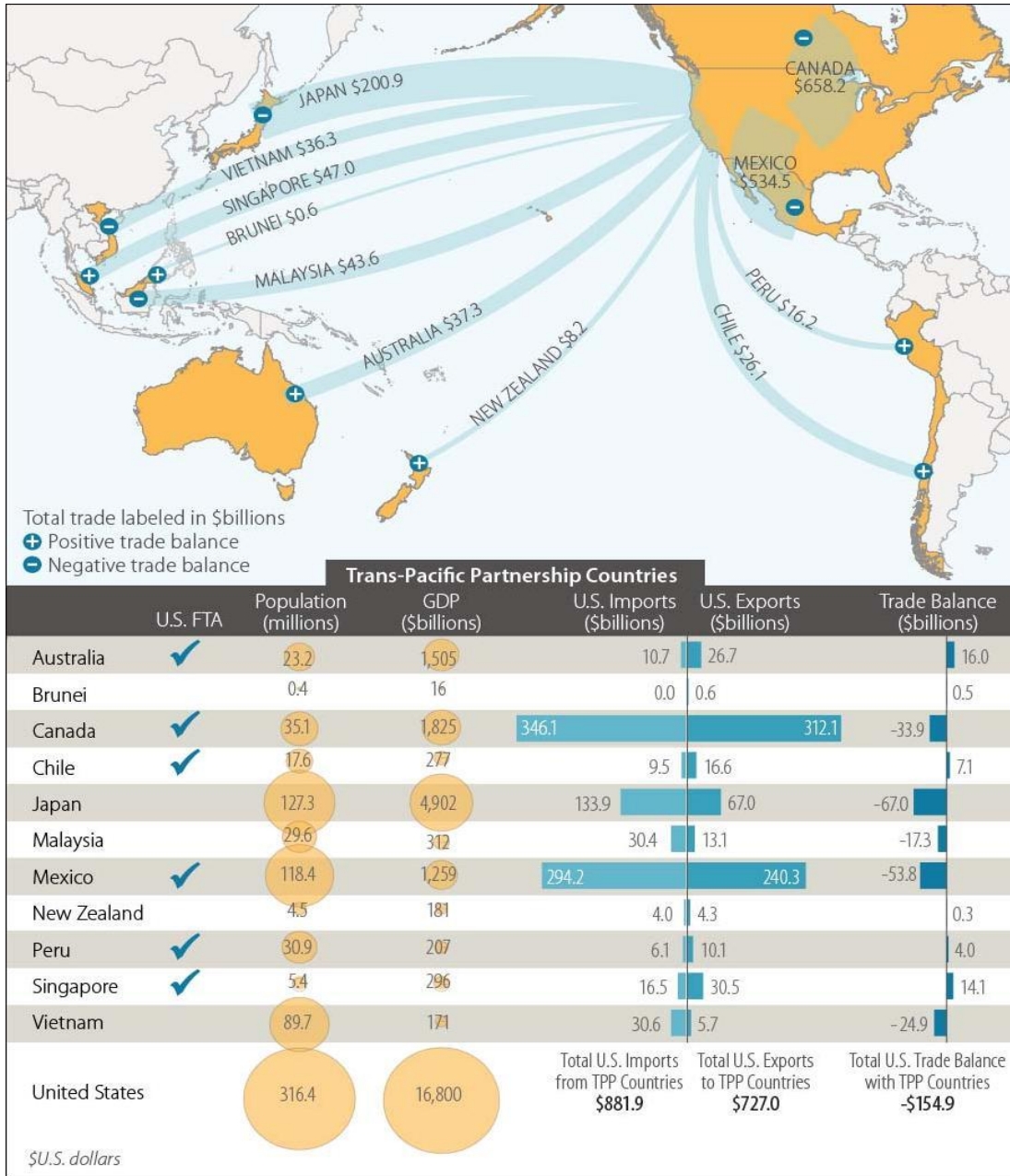
Menurut pasal 17.2 dari TPSEP menyebutkan bahwa Komisi utama yang bertanggung jawab terhadap hal-hal terkait implikasi perjanjian, pengujian perjanjian dan pertimbangan proposal untuk amandemen, mengembangkan perjanjian perdagangan dan investasi antara

⁴⁵Trans-Pacific Partnership, Office of U.S. Trade Representative, tersedia di <http://www.ustr.gov/tpp>. [Diakses pada 18 Januari 2017, pukul 19.43]

⁴⁶Meredith Kolsky Lewis, (2011), " *The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm or Wolf in Sheep's Clothing?*" , (34 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 27), hlm 31, Tersedia di <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol34/iss1/3> [Diakses pada 18 Januari 2017, pukul 14.43]

para anggota, mengidentifikasi kerjasama komersial, serta mempertimbangkan setiap masalah yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. TPSEP juga membentuk Majelis Arbitrase ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi atau prosedur lain yang melibatkan pengadilan, konsiliasi dan mediasi. TPSEP adalah perjanjian terbuka karena tujuan para negara pendiri dari awal adalah untuk memperluas TPSEP. Oleh karena itu, negara anggota APEC berkesempatan besar untuk bergabung kedalam perjanjian ini. Terbentuknya TPSEP dan berjalannya perjanjian perdagangan bebas antara negara trans-pasifik ini ternyata berhasil mendorong atensi negara lain untuk bergabung. Apalagi TPSEP bersifat ekspansif secara keanggotaan, berdasarkan kepada bab 20 pasal 20.6 yang mengatur mengenai ruang lingkup perjanjian, menyatakan bahwa perjanjian ini terbuka bagi anggota baru atas persetujuan anggota, terlebih untuk negara anggota APEC, namun tidak menutup kemungkinan untuk negara non-APEC (h.20.1-20.3). Sehingga, selama proses negoisasi berjalan, TPP pun masih menampung anggota baru, terlebih lagi negara APEC berkesempatan besar untuk dapat bergabung kedalam perjanjian tersebut.⁴⁷

⁴⁷Ann Capling, "Multilateralising PTAs in the Asia-Pacific Region": A Comparison of the ASEAN–Australia–NZ FTA and the P4 Agreement, hlm 8.



Sumber: Analysis by CRS. Population and GDP data from IMF, World Economic Outlook,

Gambar 3.1 Negara Anggota Transpacific Partnership

B. Investasi dan Perdagangan Amerika Serikat dengan negara anggota

Transpasific Partnership

Perdagangan AS dengan negara-negara TPP adalah lebih dari \$ 1,6 triliun pada barang dagangan pada tahun 2014 dan lebih dari \$ 273.000.000.000 di jasa pada tahun 2013, periode terakhir dimana data yang tersedia (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2). Investasi asing langsung (FDI) Amerika Serikat ke negara-negara TPP mencapai hampir \$ 860000000000 pada tahun 2013, sementara negara-negara TPP menginvestasikan lebih dari \$ 69 miliar pada Amerika Serikat (Tabel 3.3). Bahkan sebelum Meksiko dan Kanada menjadi mitra negosiasi dalam TPP, perjanjian ini berpotensi menjadi US FTA terbesar kedua dan ketika Jepang juga turut berpartisipasi, TPP menjadi US FTA paling besar. Sehingga perjanjian TPP ini tidak hanya nomor dua saja tetapi sudah menjadi nomor satu terbesar.

Dua belas negara anggota TPP memiliki keanekaragaman dalam populasi dan pembangunan, ekonomi, dan hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Ekspor barang utama Amerika Serikat dengan negara-negara anggota TPP meliputi kendaraan bermotor dan suku cadang, minyak bumi dan batu bara, peralatan komputer dan komponen elektronik, pertanian dan konstruksi mesin, dan pesawat. Namun impor barang Amerika Serikat berbeda di setiap negara, seperti pertanian dan sumber daya alam produk merupakan impor utama Amerika Serikat dari Australia, Chili, Selandia Baru, dan Peru, sedangkan produk pakaian merupakan

impor utama Amerika Serikat dari Vietnam. Kanada dan Meksiko merupakan pemasok utama minyak mentah ke Amerika Serikat, tetapi mereka juga menyediakan produk-produk manufaktur seperti kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor. Impor Amerika Serikat dari Malaysia dan Singapura yaitu terdiri dari produk manufaktur seperti komputer, semi konduktor, dan komponen elektronik. kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor membuat hampir 35% dari impor barang AS dari Jepang.

Dari segi nilai, Kanada dan Meksiko bermitra dagang dengan Amerika Serikat terbesar diantara negara-negara anggota TPP lainnya, keduanya bermitra kerja dengan Amerika Serikat secara signifikan dalam hal perdagangan jasa dan investasi. Jepang merupakan mitra kerja ke tiga terbesar dalam perdagangan barang dan jasa Amerika Serikat-TPP. Mengingat delapan mitra TPP lainnya, Singapura dan Australia adalah pasar Amerika Serikat dalam barang ekspor dan perdagangan dan investasi secara keseluruhan, sementara Malaysia, Vietnam, dan Singapura adalah sumber atas impor barang AS.⁴⁸

⁴⁸ Fergusson, I.F., Vaughn B., *"The Trans-Pacific Partnership Agreement"* (Congressional Research Service, 20 Maret 2015)

Tabel 3.1 Perdagangan Barang AS dengan Negara TPP, 2014

(in millions of U.S. dollars, ordered by total trade)

Country	Exports	Imports	Balance	Total Trade
Canada	312,125	346,063	-33,938	658,188
Mexico	240,326	294,157	-53,831	534,483
Japan	66,964	133,939	-66,975	200,903
Singapore	30,532	16,463	14,069	46,995
Malaysia	13,136	30,448	-17,312	43,584
Australia	26,668	10,670	15,998	37,338
Vietnam	5,725	30,584	-24,859	36,309
Chile	16,630	9,491	7,139	26,121
Peru	10,070	6,079	3,991	16,149
New Zealand	4,261	3,980	281	8,241
Brunei	550	32	518	582
Total	726,987	881,906	-154,919	1,608,893

Source: U.S. International Trade Commission.**Table 3.2 Perdagangan Jasa AS dengan Negara Anggota TPP, 2013**

(in millions of U.S. dollars, ordered by total trade)

Country	Exports	Imports	Balance	Total Trade
Canada	63,281	30,452	32,829	93,733
Japan	46,270	30,006	16,264	76,276
Mexico	29,855	17,766	12,089	47,621
Australia	19,136	6,948	12,188	26,084
Singapore	11,404	5,559	5,845	16,963
Chile	3,608	1,207	2,401	4,815
New Zealand	2,110	1,516	594	3,626
Malaysia	2,687	1,481	1,206	4,168
Total	178,351	95,221	83,130	273,572

Source: Bureau of Economic Analysis, U.S. International Services, Detailed Statistics for Cross-Border Trade, Table 2.

Table 3.3 Investasi Asing Langsung (FDI) AS dengan Negara Anggota TPP, 2013

(in millions of U.S. dollars, ordered U.S. FDI Flow Abroad)

Country	U.S. FDI Abroad (Flow)	U.S. FDI Abroad (Stock)	FDI in U.S. (Flow)	FDI in U.S. (Stock)
Canada	23,155	368,297	23,336	237,921
Australia	22,951	158,996	-3,079	44,742
Singapore	17,452	154,438	1,148	19,760
Mexico	7,626	101,454	3,130	17,610
Chile	3,624	41,110	62	487
Peru	1,425	10,061	-20	100
Japan	7,368	123,174	44,861	342,327
Malaysia	2,724	16,409	-41	635
New Zealand	-846	7,919	-39	972
Vietnam	234	1,398	-287	-276
Brunei	16	132	(D)	(D)
Total	85,729	983,388	69,071	664,278

Source: Bureau of Economic Analysis.

C. Area Isu Spesifik *Trans-pasific Partnership*

Ada 30 pasal dalam perjanjian TPP, mulai dari akses pasar (seperti penghapusan tarif dan nontarif hambatan dan kuota pada pertanian, tekstil, pakaian, dan otomotif), aturan khusus tentang berbagai isu yang terkait dengan perdagangan (seperti hak kekayaan intelektual, masalah peraturan, dan tenaga kerja dan standar lingkungan). Dibawah ini ialah beberapa isu dalam Transpasific Partnership.

C.1. Akses Pasar barang dan Jasa

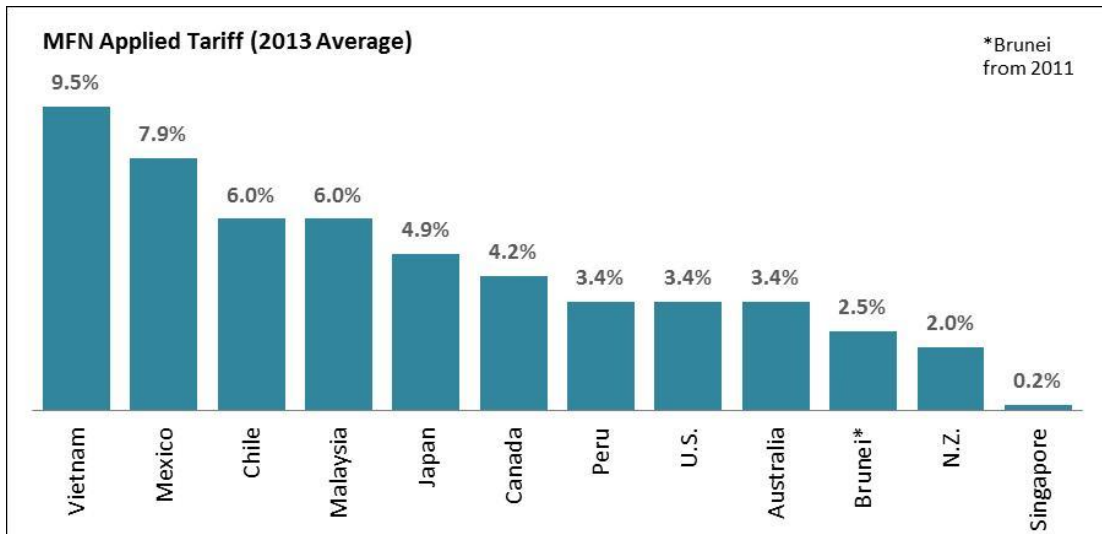
Unsur dasar dalam sebuah perjanjian perdangan bebas ialah komitmen antar negara anggota TPP untuk menghilangkan sebagian besar tariff dan kuota perdangan barang pertania mereka. Rata-rata tingkat tariff

most-favored nation (MFN) setiap negara TPP bervariasi dari 0% hingga 10% (Tabel 3.4). TPP akan mencakup tarif lebih dari 11.000 kategori komoditas untuk masing-masing negara anggota. Pada pertemuan mereka November 2011 di Honolulu, para menteri perdagangan TPP menyatakan bahwa mereka mewajibkan akses bebas bea untuk perdagangan barang.

Negosiasi akses pasar Amerika Serikat di dalam TPP ialah secara bilateral, sehingga penghapusan tarif impor Amerika Serikat di setiap negara anggota berbeda. Menurut penghapusan tarif yang dirilis, tarif pada semua barang yang diproduksi akan dihilangkan. Beberapa tarif akan segera dihapus sementara yang lain akan bertahap selama waktu yang lebih lama, hingga maksimal 30 tahun. Untuk barang-barang pertanian, tarif dan kuota pada beberapa produk yang paling sensitif akan tetap di tempatnya. Rata-rata di seluruh 11 negara mitra TPP, sekitar 90% dari pos tarif AS dan 88% dari pos tarif negara mitra akan bebas bea ketika perjanjian mulai berlaku, dengan rata-rata (86% untuk impor AS dan 84% untuk ekspor AS) di lima negara yang ada (Brunei, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, dan Vietnam).⁴⁹

⁴⁹Ian F. Fergusson, Mark A. McMinimy, Brock R. Williams, "The Trans-Pacific Partnership (TPP): In Brief", (Congressional Research Service, February 9, 2016) hlm 4.

Grafik 3. 1 Tarif Negara-Negara Anggota TPP



Sumber: WTO Tariff Profiles, Fergusson, I.F., Vaughn B., *The Trans-Pacific Partnership Agreement*. Congressional Research Service. 20 Maret 2015 hal 17

TPP dapat membangun komitmen yang sebelumnya dan menyelaraskan penghapusan tarif untuk semua anggota. Mitra TPP juga membahas ketentuan yang berhubungan dengan ekspor dan perizinan impor prosedur, masalah adat, dan fasilitasi perdagangan. Ketentuan TPP lain yang mempengaruhi akses pasar untuk barang-barang industri dan pertanian dibahas di bawah.

a. Produk Pertanian

Menegosiasikan hal liberalisasi perdagangan pertanian terus menjadi upaya dalam keseluruhan perjanjian yang ada di TPP. Dalam proses ini, negosiasi bilateral antara Amerika Serikat dan Jepang yang berhubungan dengan akses pasar untuk beberapa komoditas utama, seperti isu-isu akses pasar dengan Jepang merupakan batu loncatan penting untuk

menyimpulkan ukuran pertanian dalam perjanjian.⁵⁰ Negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Malaysia menawarkan potensi yang sangat besar dalam peternakan, pertanian, dan mengekspor makanan dari Amerika Serikat. Jepang merupakan negara yang dianggap menonjol karena pasar pertaniannya dilindungi dan memiliki populasi yang besar dan GDP perkapita yang tinggi.⁵¹

Daftar berikut ini merupakan mencakup beberapa perubahan perjanjian dalam produk pertanian dan peternakan

- **Daging Sapi**, Jepang menurunkan tarif daging sapi beku, segar dan dingin dari 38,5% menjadi 9% selama 16 tahun, dan akan menurunkan tarif pada produk daging sapi lainnya. Sementara Vietnam juga akan menurunkan tarif daging sapi selama tiga sampai delapan tahun. Amerika Serikat menghapuskan tarif pada daging sapi dan produk daging sapi berkisar 26,4% dalam waktu tidak lebih dari 15 tahun dan dalam waktu kurang dari 10 tahun
- **Pork (Babi)**, Jepang memotong tarif 4,3% pada babi segar dan dingin hingga 2,2% selama sembilan tahun. Harga impor minimum juga akan diturunkan hingga 125 yen per kilogram dari harga 42 yen. Amerika Serikat juga akan menghilangkan tarif dalam produk tersebut dan tarif Vietnam sebesar 34% dalam 10 tahun
- **Poultry (Unggas)**, mengizinkan peningkatan incremental ke unggas dan telur di Kanada yang sangat dilindungi selama lima

⁵⁰ Fergusson, I.F., Vaughn B, Op.cit., hlm 21

⁵¹ Fergusson, I.F., Vaughn B., Op.cit., 9 februari 2016, hlm 5.

tahun melalui kuota baru dengan bebas bea tariff-rate quotas (TRQs) mulai dari 1,5% hingga 2,3% dari produksi dalam negeri. Setelah itu kuota akan dinaikan setiap tahun hingga ditahun ke 19. Vietnam menghilangkan tariff (saat ini hingga 40%) dalam 13 tahun dan tarif Amerika Serikat (saat ini hingga 18,6%) dalam waktu 10 tahun.

- **Kapas**, Amerika Serikat menghilangkan tarif kapas (hingga \$ 0,314 per kg) pada tahun 2022.
- **Tembakau**, Amerika Serikat menghilangkan tarif tembakau (setinggi 350%) dalam waktu 10 tahun, tariff tembakau dan cerutu Jepang hingga 11 tahun, dan tariff tembakau dan cerutu Vietnam hingga 16 tahun. Vietnam menghilangkan tariff tembakau yang belum diprabilisasikan lebih dari 11 tahun dan pada daun tembakau dalm 21 tahun.
- **Gula**, Amerika Serikat menetapkan TRQs baru untuk gula dan produk gula sebesar 86.300 ton, dengan 65.000 ton dialokasikan untuk Australia, 19.200 ton ke Kanada, dan perpecahan residual antara Jepang, Malaysia, dan Vietnam. Australia dan TRQs Kanada termasuk potensi untuk ekspansi lebih lanjut.
- **Susu**, memungkinkan akses tambahan untuk pasar susu yang dilindungi oleh Kanada sebesar 3,25% dari produksi tahunan di bawah TRQs bertahap selama lima tahun, dengan kenaikan tahunan yang cukup. Kanada meningkatkan TRQs untuk produk susu dan

mentega diantara 14 hingga 19 tahun. Kanada menghilangkan tarif 208% pada bubuk. Menghilangkan berbagai tariff Jepang pada impor keju dalam 16 tahun. Amerikas Serikat menepakan TRQs untuk produk susu Kanada yang akan dinaikan secara bertahap sampai 19 tahun dan setelahnya menjadi tetap.⁵²

b. Otomotif

Menghilangkan tarif pada otomotif dan suku cadang mobil di negara-negara TPP dalam periode tertentu, termasuk 2,5% otomotif Amerika Serikat dan 25% untuk truk Amerika Serikat lebih dari 25 dan 30 tahun, masing-masing spesifik mendapatkan pengamanan Jepang dalam hal impor. Target ketentuan perjanjian perdangan antara Amerika Serikat dengan Jepang yang membutuhkan Jepang untuk mengatasi hambatan non tarif yang berkaitan dengan transparansi dan distribusi antara isu-isu lainnya.⁵³

c. Tekstil dan Pakaian

Perbedaan yang mungkin muncul antara negara maju dan beberapa negara berkembang, termasuk juga negara-negara anggota TPP menghilangkan semua tariff impor atas produksi tekstil dan pakaian dalam beberapa periode. Seperti contoh, Amerika Serikat menjadi tujuan utama bagi Vietnam untuk impor produk pakaian yang bergantung pada jumlah tertentu yang diatur dalam perjanjian TPP.⁵⁴

⁵²Ibid

⁵³ibid

⁵⁴Ibid hlm 6.

d. Barang dan Jasa

Sebuah prioritas tinggi bagi Amerika Serikat dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional yang telah meningkatkan akses pasar bagi penyedia layanan, jasa terutama keuangan, termasuk asuransi dan perbankan; layanan profesional, termasuk jasa hukum dan pelayanan pendidikan swasta; jasa telekomunikasi; pengiriman cepat; e-commerce dan arus data. Perjanjian perdagangan bebas Amerika Serikat dengan anggota TPP seperti Australia, Kanada, Chili, Meksiko, Peru, dan Singapura sudah mencakup perdagangan jasa, Jepang juga merupakan mitra utama Amerika Serikat dalam perdagangan jasa. Selain itu inovasi mengenai perdagangan jasa merupakan bagian penting visi Obama dari perjanjian TPP sebagai “*21-century model*” untuk perjanjian perdagangan, dan Amerika Serikat berupaya memperluas perdagangan dengan anggota TPP.

Menurut kesepakatan, TPP akan mencakup perdagangan jasa di beberapa bab yang terpisah dengan saling melengkapi. Bagian pada perdagangan lintas batas dalam layanan, di mana pembeli dan penjual yang berlokasi di berbagai wilayah-akan menggunakan “*negative list approach*” (seperti yang dilakukan dalam perjanjian P-4), yaitu, ketentuan yang berlaku untuk semua jenis layanan kecuali secara khusus dikeluarkan oleh negara mitra dalam lampiran perjanjian.⁵⁵

⁵⁵ Fergusson, I.F., Vaughn B., *The Trans-Pacific Partnership Agreement*. Congressional Research Service. 20 Maret 2015 hal 18

Negosiasi atas ketentuan layanan dapat menyebabkan kontroversi antara negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, dan Singapura, dan negara-negara berkembang. Negara-negara maju telah mendorong untuk akses pasar yang lebih besar untuk layanan. Negara-negara berkembang lebih berhati-hati pada liberalisasi perdagangan jasa karena mereka takut dalam persaingan di sektor, mereka juga melihat sumber lapangan kerja dalam negeri dan khawatir tentang implikasi politik memaksa sektor terbuka yang sering dikendalikan oleh kepentingan yang kuat secara politik.

C.2. Bea dan Fasilitasi Perdagangan

Akses ke pasar luar negeri tergantung pada memfasilitasi pergerakan barang dan jasa lintas batas. TPP mencakup komitmen pada rilis efisien barang, penanganan pengiriman ekspres, pengolahan elektronik dokumentasi pabean, dan inspeksi berdasarkan teknik manajemen, serta peningkatan transparansi.

C.3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ketentuan yang mengatur HKI ialah melindungi inovasi dalam berbagai bentuk. Ketentuan TPP yaitu berusaha untuk meningkatkan tingkat perlindungan HKI di luar ketentuan WTO di tahun 1994 dalam aspek *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) *Agreement*, di bidang-bidang seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Beberapa perjanjian perdagangan bebas Amerika

Serikat berbeda dengan lingkup dan kekuatan dari ketentuan HKI mereka berdasarkan perkembangan ekonomi negara mitra perjanjian perdagangan bebas. Menentukan mekanisme transisi untuk negara-negara berkembang dengan kewajiban HKI tertentu dalam TPP, misalnya tentang akses obat-obatan. Periode transisi ini bervariasi menurut negara dan penyediaan, berkisar hingga 10 tahun dengan kemungkinan ekstensi tambahan untuk Vietnam dalam kebijaksanaan melalui Komisi TPP.

- Biologis, Menyediakan pilihan kepada negara-negara antara data eksklusif delapan tahun untuk obat biologi atau setidaknya 5 tahun dengan kemungkinan penambahan pengukuran hasil pasar perbandingan yang didapat
- Paten Farmasi. Mengharuskan negara-negara untuk memberikan periode eksklusivitas data lima tahun untuk obat-obatan, hubungan paten, dan ekstensi jangka paten dalam hukum domestik mereka, dan tambahan tiga tahun eksklusivitas data untuk informasi klinis baru untuk obat yang sudah ada, meliputi indikasi baru, formulasi, atau administrasi. Termasuk periode fase-in untuk negara-negara berkembang untuk mengadopsi ketentuan ini dan memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat konsisten dengan perjanjian TRIPs di WTO.
- Hak cipta. Meningkatkan istilah hak cipta dari 50 tahun ke untuk 70. tahun dengan periode fase-in untuk negara-negara saat ini

memberikan 50 tahun perlindungan. Termasuk hukuman pidana dan perdata untuk menghindari TPM (*technological protection measures*) atau tindakan perlindungan teknologi. Mendorong negara-negara untuk mencapai keseimbangan yang tepat antar pengguna dan pemegang hak dalam sistem yang dikenal hak cipta sebagai “penggunaan yang adil”. Mengadopsi *AS-Style* “pemberitahuan dan penghapusan” ketentuan kewajiban untuk mengatasi *Internet Service Provider* (ISP) pada negara-negara tertentu, dan memungkinkan sistem alternatif tertentu yang ada.

- Merek Dagang. Membutuhkan otoritas *Ex Officio* untuk agen tertentu. Pabean merebut barang palsu dan bajakan. Memberikan keleluasaan kepada pihak berwenang untuk menggunakan informasi barang atau berbagai informasi mengenai barang-barang tersebut dengan negara tujuan dan untuk menggunakan barang dengan merek dagang yang hampir sama. Memberikan aturan pada penggunaan indikasi geografis.
- Bertukar rahasia. Membutuhkan hukuman pidana bagi mereka mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Negara dapat mempertahankan ketentuan yang berkaitan dengan pengungkapan itikad hukum itikad baik oleh *whistle-blower*⁵⁶

⁵⁶ Fergusson, I.F., Vaughn B., *The Trans-Pacific Partnership Agreement*. Congressional Research Service, 9 februari 2016 hal 9